

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan tidak pernah ada habisnya untuk diperbincangkan, terutama masalah lingkungan di Indonesia. Saat ini lingkungan telah terancam dengan berbagai macam aktivitas manusia. Tujuan utama dari perusahaan adalah memaksimalkan laba sekaligus kesejahteraan pemegang saham, tetapi masih banyak perusahaan yang hanya berfokus pada laba dan tidak peduli akan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasinya terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan menjadi sorotan utama dalam kontribusinya terhadap lingkungan. Seperti contoh kasus pencemaran limbah udara oleh PT. Rayon Utama Makmur Sukoharjo, masalah IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang tidak sesuai aturan oleh PT. Indotama, pencemaran air oleh PT. Energi Agro Nusantara, perluasan pabrik pengolahan limbah B3 yang berbahaya oleh PT. PRIA dan masih banyak lagi kasus lainnya, tidak hanya dampaknya terhadap lingkungan, dampak ekonomi serta kegiatan sosial yang terjadi disekitar perusahaan tersebut ikut terhenti, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap peran perusahaan dalam menjaga lingkungan. Situasi ini mendorong masyarakat untuk menuntut tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih besar dan berkualitas.

Dari paradigma yang marak terjadi, pemerintah mengeluarkan keputusan yang kemudian diterbitkan melalui undang-undang tentang Perseroan Terbatas (PT) yang mengungkapkan berbagai ketentuan pendirian PT, salah satunya

pasal 74, UU Nomor 40 tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, UU No.23 tahun 2007 mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan berdasarkan PP No. 27 tahun 2007 yang mengharuskan adanya AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan) dari suatu proyek, yang menjadi landasan dan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi keberlanjutan dan seiring dengan ditandatanganinya pedoman penyusunan SIH (Standar Industri Hijau) Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 oleh Menteri Perindustrian Indonesia diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan proses produksinya yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan. Pada tahap awal SIH ini bersifat sukarela (*voluntary*) namun seiring berjalannya waktu secara selektif akan bersifat wajib dan akan dikenakan sanksi pada perusahaan yang tidak memenuhi standar.

Dalam *stakeholder theory*, bahwa penting adanya para pemangku kepentingan dalam suatu bisnis, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan investor saja tetapi juga harus peduli terhadap karyawan, konsumen dan masyarakat karena perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar dari kepentingan manajemen dan pemilik modal. Kegiatan pengelolaan pada perusahaan saat ini tidak hanya didasarkan oleh aspek ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan terkait dimana perusahaan itu berada (Nasir *et al.*, 2014), (Khafid dan Mulyaningsih, 2015).

Corporate Social Responsibility (CSR) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) menjadi perbincangan serius beberapa dekade terakhir. Masyarakat memerlukan informasi mengenai sejauh mana perusahaan telah

melaksanakan kegiatan sosialnya untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat sekitar telah terpenuhi (Trinanda *et al.*, 2018). Program *CSR* merupakan salah satu sarana bagi perusahaan untuk menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan kontribusinya bagi masyarakat, sosial, dan lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang keberlanjutan serta perusahaan dituntut untuk memberikan informasi dari setiap kegiatan yang dijalankan (Singgih *et al.*, 2017).

Sustainability report atau laporan keberlanjutan adalah praktik pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan untuk pembangunan keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal perusahaan (Aziz, 2014). Selain itu *sustainability report* merupakan cerminan kinerja organisasi dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang dapat menjadi media bagi perusahaan untuk menginformasikan kinerja organisasinya kepada seluruh pemangku kepentingan, yang nantinya dapat membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja dan mengelola perubahan dalam rangka membuat operasi organisasi terus keberlanjutan (Sari *et al.*, 2017). Dengan adanya pengungkapan *sustainability report* diharapkan dapat mencuri perhatian dalam bisnis global dan merupakan salah satu kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial suatu perusahaan.

Badan yang mengeluarkan standar pembentukan laporan keberlanjutan terkait pengungkapan lingkungan hidup yang masih aktif hingga saat ini adalah *Global Reporting Initiative (GRI)*. *Sustainability report* atau laporan keberlanjutan memberikan informasi tentang adanya dampak suatu perusahaan

terhadap aspek lingkungan dan sosial selain dari aspek ekonomi. *GRI-standards* merupakan pedoman atau standar dalam pembuatan laporan keberlanjutan. Indikator yang terdapat dalam *GRI-standards* dibagi menjadi 3 kategori khusus yaitu: ekonomi, lingkungan dan sosial, dengan total indikator sebanyak 77 item (GRI, 2016).

Di Indonesia pelaporan keberlanjutan atau *sustainability report* masih bersifat sukarela (*voluntary*) tidak seperti pelaporan keuangan dan pelaporan tahunan yang bersifat wajib (*mandatory*) terutama bagi perusahaan-perusahaan go-publik (Hasanah *et al.*, 2015). Praktik dan pengungkapan *sustainability report* merupakan mekanisme dan konsekuensi nyata dari implementasi *Good Corporate Governance* yang memiliki prinsip bahwa *stakeholder* memerlukan perhatian, baik dalam hal aturan yang ada serta menjalin kerjasama yang aktif untuk kelangsungan hidup jangka panjang antara *stakeholder* dengan perusahaan (Aliniar dan Wahyuni, 2017).

Tuntutan atas kualitas laporan keberlanjutan bukan hanya dari pihak eksternal (*stakeholder*) namun juga dari pihak internal perusahaan (*corporate governance*). Tata kelola yang baik dalam perusahaan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik pula, dengan diterapkan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dinilai telah berupaya untuk menyampaikan seluruh informasi kepada para pemangku kepentingan termasuk laporan keberlanjutannya (*sustainability report*).

Pemangku kepentingan merupakan seseorang, kelompok, atau organisasi yang memiliki ketertarikan atau kepentingan dalam organisasi tertentu (Rudyanto dan Siregar, 2018). Tanpa adanya dukungan dari para pemangku

kepentingan (*stakeholder*) perusahaan tidak dapat menjalankan usahanya dan setiap klasifikasi industri memiliki pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berbeda-beda (Fernandez-Feijoo *et al.*, 2012). Tekanan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan menuntut adanya pelaksanaan dan pengkomunikasian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk laporan, tidak hanya dalam bentuk laporan saja tetapi dalam bentuk laporan yang berkualitas. Jenis laporan yang dimaksud yang paling lengkap, komprehensif dan merupakan jenis laporan sukarela yaitu laporan keberlanjutan (*sustainability report*) (Rudyanto dan Siregar, 2018).

Penelitian Rudyanto dan Siregar (2018) menunjukkan bahwa tekanan *stakeholder* yang dikembangkan oleh Fernandez-Feijoo *et al.* (2012) diproksikan dengan industri berorientasi pekerja dan industri berorientasi investor berpengaruh tidak signifikan terhadap transparansi laporan keberlanjutan kemudian industri sensitif lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Hamudiana dan Achmad (2017) bahwa industri sensitif lingkungan berpengaruh negatif dan industri berorientasi pekerja dan industri berorientasi investor berpengaruh positif. Kemudian untuk industri dekat konsumen hasil penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto dan Siregar (2018) dan Hamudiana dan Achmad (2017) berpengaruh tidak signifikan bertolak belakang dengan hasil penelitian Fernandez-Feijoo *et al.* (2012) bahwa untuk industri dekat konsumen berpengaruh positif terhadap *sustainability report*.

Penelitian yang terkait dengan tema *corporate governance* pada pengungkapan *sustainability report* diukur dengan indikator yang berbeda-beda antara peneliti satu dengan yang lain, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Aziz (2014) yang diukur dengan menggunakan kepemilikan saham manajerial yang berpengaruh positif terhadap transparansi pengungkapan *sustainability report*, kemudian dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan saham institusional dan terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasanah *et al.* (2015). Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian Siregar (2017), dari penelitian yang dilakukan beberapa peneliti menyimpulkan hasil yang berbeda-beda antara peneliti yang satu dan peneliti lainnya. Penelitian tentang pengaruh tekanan *stakeholder* dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* hanya menunjukkan dampaknya terhadap kuantitas bukan kualitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tekanan *Stakeholder* berpengaruh terhadap Kualitas *Sustainability Report*?
2. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kualitas *Sustainability Report*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh Tekanan *Stakeholder* terhadap Kualitas *Sustainability Report*.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kualitas *Sustainability Report*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai Pengaruh Tekanan *Stakeholder* dan *Corporate Governance* Terhadap Kualitas *Sustainability Report*.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai sumber informasi yang diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia bahwa pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diberikan.